

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap tahunnya, secara akrual suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan, hal ini sudah menjadi kewajiban perusahaan tersebut selain sebagai bentuk pertanggungjawaban juga untuk memfasilitasi sumber informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti para investor, pemegang saham, kreditur, supplier hingga pemerintah. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Informasi laba juga dapat membantu pemilik atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menaksir *earning power* perusahaan di masa yang akan datang. Menurut IAI (2009) informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Sayangnya, karena posisinya yang penting sebagai indikator dari pihak lain dalam mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan, dan ditambah dengan sifat laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga sering ditemui adanya praktik pengelolaan informasi laba secara oportunistik untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan pada umumnya rekayasa tersebut dilakukan oleh pihak manajemen. Tindakan *oportunistik* ini dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Manajemen perusahaan dapat menentukan kebijakan penggunaan metode akuntansi dan melakukan manipulasi dalam menyusun laporan keuangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Sehingga laporan keuangan akan menunjukkan hasil yang memuaskan meski tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Tindakan dari manajemen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba (*earning managements*).

Scott (2012:351) menyatakan bahwa manajemen laba adalah pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik. Kondisi ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan para manajer; dimana para manajer yang lebih banyak mengetahui tentang informasi internal dan prospek perusahaan dimasa mendatang daripada pemilik perusahaan atau para investor (Rahmawati *et al.*, 2006). Kondisi ini dikenal dengan asimetri informasi atau informasi yang tidak simetris.

Terjadinya hal semacam ini dikenal karena adanya konflik keagenan, yakni konflik yang timbul karena adanya suatu sistem pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Dalam artian, manajer selaku pengelola perusahaan bukanlah pemilik, melainkan sebagai kepanjangan tangan dari investor atau pemilik usaha yang diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya atas nama pemilik. Masalahnya, keleluasaan yang diberikan kepada manajer dalam mengelola perusahaan juga dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Dengan seringkali tindakan para manajer bukan memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan, melainkan justru termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri (Almilia dan Silvy, 2006).

Dalam akuntansi terdapat dua metode untuk mengakui pencatatan pendapatan perusahaan, yaitu metode berbasis akrual dan basis kas. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual harus dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Namun, dengan menggunakan basis akrual dapat memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam memilih metode akuntansi sehingga mereka tidak akan menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan (Sirat, 2012). Sebagian besar perusahaan menggunakan metode berbasis akrual dalam pengakuan pendapatannya, sehingga laba yang terkandung di dalamnya merupakan laba akrual (Widyastuti, 2009).

Wild *et al.* (2003) dalam Achmad *et al.* (2007) mengkritik bahwa akuntansi akrual merupakan aturan yang tidak sempurna dan mengaburkan laporan

keuangan yang bertujuan memberikan informasi aliran kas dan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan kas. Kelemahan akuntansi akrual menimbulkan peluang bagi manajer untuk mengimplementasikan strategi manajemen laba. Strategi ini dikategorikan menjadi pilihan kebijakan/metode akuntansi dan *discretionary accruals* (Ahmad *et al.*, 2007). Manajemen laba berbeda dengan perataan laba (*income smooting*) karena perataan laba (*income smooting*) adalah tindakan untuk meratakan laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

Bentuk-bentuk penyimpangan akuntansi yang diwujudkan dalam praktik manajemen laba bisa kita jumpai dalam berbagai kasus, dan umumnya kasus karena tindakan manajemen laba telah menjadi skandal yang tidak bisa dikatakan kecil. Tindakan *earnings management* telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, WorldCom, dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett *et al.*, 2009). Di Indonesia, praktik *earning management* yang berujung pada kegagalan audit terjadi pada perusahaan Kimia Farma dan Bank Lippo (Boediono, 2005). Kasus perusahaan Kimia Farma terjadi *mark up* terhadap laba tahun 2001. Sedangkan pada Bank Lippo terjadi pembukuan ganda pada tahun 2002. Pada tahun tersebut, Bapepam menemukan adanya tiga versi laporan keuangan Bank Lippo. Akibat adanya manipulasi tersebut, Bapepam menjatuhkan sanksi denda kepada PT Kimia Farma dan Bank Lippo beserta auditor yang melakukan audit pada perusahaan tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Price

Waterhouse Coopers pada tahun 1999 antara investor internasional di Asia, ditemukan ternyata peringkat Indonesia adalah salah satu yang terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi (FCGI, 2006) dalam Olivia dan Tirok (2009). Dengan sampel sebanyak 33 negara dalam pengamatan dari tahun 1993 sampai tahun 2003 guna memberikan membuktikan adanya perbedaan kualitas laba di berbagai negara dikarenakan adanya perbedaan proteksi terhadap investor, penelitian U-Thai (2005) juga menemukan bahwa Indonesia berada pada kelompok negara dengan rata-rata manajemen laba tinggi, dan tingkat proteksi investor di Indonesia dinilai relatif rendah.

Di tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini, serta dengan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan dan mengkomunikasikan ketidakharmonisan dalam pengelolaan perusahaan antara prinsipal dan agen diperlukan suatu pengelolaan perusahaan yang transparan agar bisa menekan terjadinya kemungkinan praktik manajemen laba. *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Pengertian *corporate governance* menurut FCGI yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan. Daniri (2005) dan Haron (2009) dalam Hadiprajitno (2013) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dapat dibagi menjadi dua mekanisme, mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme pencegahan kesalahan internal terdiri dari komite audit, komite pemantauan risiko, audit internal, dan pemantauan risiko, yang membantu dewan komisaris (*board*) dalam menciptakan sistem pengendalian. Mekanisme eksternal termasuk auditor eksternal, otoritas regulasi, dan pemegang saham. Pemilik (*shareholder*) memegang peran penting dalam penentuan struktur perusahaan,

Dalam rangka pelaksanaan *corporate governance* yang baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan tanggal 1 Juli 2001 yang mengatur tentang pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit.

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Hal ini disebabkan karena komite audit akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya. Berdasar surat keputusan Ketua BAPEPAM Kep-

643/BL/2012, Keputusan Menteri BUMN Nomor Per-12/MBU/12 Tahun 2012, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003 Pasal 70, Pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).

Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kerja. Widyastuti (2009) yang menggunakan tahun pengamatan 2005 menemukan bahwa kepemilikan manajerial secara signifikan berhubungan negatif dengan praktik manajemen laba di perusahaan. Berlawanan dengan itu Klein (2002) menemukan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dalam perusahaan justru meningkatkan kemungkinan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Di Indonesia kesimpulan Klein (2002) dikuatkan penelitian Boediono (2005) yang meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* dan dampak manajemen laba terhadap kualitas laba dari tahun 1996-2002.

Sedangkan kepemilikan oleh institusional dinilai dapat mengurangi praktek manajemen laba karena manajemen menganggap institusional sebagai *sophisticated investor* dapat memonitor manajemen yang dampaknya akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba (Midiastuty dan Mas'ud, 2003). Cornett *et al.* (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *oportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

Selain penerapan *corporate governance*, Ukuran perusahaan juga menanggung peranan penting dalam perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba. Pada perusahaan besar dianggap lebih sedikit terjadi praktek manajemen laba dibanding perusahaan dengan ukuran kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan pihak luar. Sehingga perusahaan besar mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan yang *kredibile*. Atau dalam istilah lainnya menurut Nasution dan Setiawan (2007), perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Sebaliknya perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sehingga praktik manajemen laba lebih besar kemungkinannya.

Sistem pemberian kompensasi, memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen. Scott (2003:377) menyatakan manajemen laba umumnya terjadi pada perusahaan yang memiliki rencana atau program pemberian bonus.

Penelitian ini mengintegrasikan dari beberapa penelitian yg dilakukan diantaranya oleh Tri Widyastuti (2009), Siregar dan Utama (2005) serta penelitian dari Rahmawati (2011). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menguji

kembali faktor – faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba karena adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) pada penelitian–penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal yakni :

1. Penelitian ini menggunakan pergantian KAP sebagai variabel independen dalam menguji pengaruhnya dengan manajemen laba. Pada penelitian terdahulu serta kebanyakan penelitian lainnya diukur dengan menggunakan proksi ukuran KAP, tetapi penggunaan ukuran KAP sebagai variabel independen pada penelitian terdahulu mendapat kritikan setelah merebaknya kasus Enron yang melibatkan KAP besar.
2. Pada penelitian sebelumnya yakni Siregar dan Utama (2006) serta penelitian lainnya yang secara gamblang membahas tentang pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba mengalami cukup kesulitan dalam memonitoring komisaris independen dan komite audit, karena aturan pembentukan komite audit baru ada di akhir 2001. Tetapi penelitian ini memiliki selisih waktu yang lebih panjang sehingga data dan monitoring bisa dilakukan secara lebih maksimal.
3. Berbeda pada kebanyakan penelitian sebelumnya yang menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai sampel penelitian, pada penelitian ini fokus sampel dikhususkan pada perusahaan-perusahaan besar yang secara luar biasa mampu bertahan dalam jajaran LQ-45 antara tahun 2009-2013.

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kompensasi manajemen, dan pergantian KAP terhadap manajemen laba. Sampel yang digunakan berasal dari perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 di Indonesia antara tahun 2009-2013. Sektor ini dipilih karena saham kelompok LQ-45 merupakan saham terpilih yang dianggap memenuhi kriteria antara lain likuiditas, kapitalisasi pasar yang tinggi, frekuensi perdagangan yang tinggi, dan prospek pertumbuhan serta kondisi keuangan yang cukup baik. Sehingga dalam kaitannya dengan manajemen laba, keberadaan suatu perusahaan selama lima tahun terakhir berturut-turut merupakan prestasi tersendiri yang penulis anggap sebagai hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul penelitian ini adalah **"Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kompensasi manajemen, dan pergantian KAP Terhadap Praktik Manajemen Laba"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Apakah struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kompensasi manajemen, dan pergantian KAP memiliki pengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial dari struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kompensasi manajemen, dan pergantian KAP terhadap terjadinya praktik manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan dalam memahami struktur Corporate Governance dalam perusahaan serta menambah lagi wawasan penulis tentang faktor-faktor mekanisme manajemen laba.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, utamanya terkait fenomena hasil penelitian pada perusahaan LQ-45.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk mencermati laporan keuangan yang terdapat dalam perusahaan *go public* terutama yang

berkaitan dengan struktur kepemilikan, penerapan *corporate governance* dalam kaitannya untuk pengambilan investasi.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam mencermati perilaku manajemen dalam aktivitas manajemen laba yang berkaitan dengan pencapaian kompensasi bonus.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bagian yaitu :

Bab 1 : Pendahuluan

Membahas mengenai gambaran ringkas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Membahas tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Agency. Selain itu dalam dalam Bab II ini dijelaskan mengenai Manajemen Laba, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kompensasi manajemen, dan pergantian KAP yang merupakan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi manajemen laba. Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada akan membentuk kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab 3 : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal penelitian.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Berisikan pokok dari penelitian yang mencakup deskripsi objek penelitian dan analisis data, serta pembahasan mengenai Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kompensasi manajemen, dan pergantian KAP.

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Memaparkan kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran sekaligus implikasi untuk penelitian selanjutnya.